

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT LITERASI KEKOPERASIAN ANGGOTA
TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH
(PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Fauziah Rahmah dan Amelia Pratiwi

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar
Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

Email : fauziah.rahmah.2015@fai.umy.ac.id

ameliapратиwi@fai.umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat literasi kekoperasian anggota terhadap kinerja keuangan koperasi syariah. Tingkat literasi kekoperasian anggota koperasi perlu dipertanyakan mengingat tidak semua koperasi melaksanakan fungsi pendidikan koperasi bagi anggotanya. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dan dilakukan di 14 Koperasi Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Literasi kekoperasian anggota diukur oleh 6 indikator pengetahuan, yaitu: 1) mengenai jati diri lembaga (JDL); 2) tugas dan kewajiban lembaga (TDK); 3) keorganisasian lembaga (KL); 4) perannya sebagai anggota koperasi (PA); 5) mekanisme simpanan (MS); 6) dan mekanisme pembiayaan (MP). Kinerja Keuangan Koperasi Syariah diukur dengan menggunakan SHU, ASET, DPK, rasio modal terhadap aset, *cash ratio*, dan rentabilitas. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel pengukur literasi kekoperasian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota. Sementara itu untuk literasi kekoperasian anggota berpengaruh negatif (tidak langsung) dan signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi syariah. Setelah dilakukan pengujian, hanya terdapat 3 indikator keuangan yang dapat digunakan, yaitu SHU, DPK, dan *cash ratio*. Tingkat Literasi Kekoperasian dapat menjelaskan 8% dari kinerja keuangan. Tertolaknyanya hipotesis ke tujuh cenderung disebabkan oleh; 1) Belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan koperasi bagi anggotanya; 2) Pemahaman yang masih kurang akan koperasi; 3) Tindakan nyata lebih berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: literasi kekoperasian, koperasi syariah, pendidikan koperasi, kinerja keuangan

Analysis of The Members' Cooperative Literacy on The Financial Performance of Sharia Cooperatives: A Case Study of Sharia Savings and Loan Cooperatives in The Special Region of Yogyakarta

This study is intended to determine the effect of the literacy level of Islamic cooperative members on the financial performance of these institutions. It analyzes 14 Sharia cooperatives in the Special Region of Yogyakarta as samples, which are selected using the purposive sampling method. The measurement of cooperative literacy uses six indicators, which are measured the knowledge of institutional identity (JDL), the duties and obligations of institutions (TDK), the organizational institutions (KL), the role of cooperative members (PA), the deposits mechanisms (MS), as well as the financing mechanisms (MP). Financial performance is measured using net income, total assets, total deposits, solvability, liquidity, and profitability. The results show that all cooperative literacy indicators have a significant influence on the level of cooperative literacy. However, the cooperative literacy of members does not have a significant positive effect on the financial performance of the institutions. It tends to be due to the lack of cooperative education for its members so that they do not have enough knowledge about all aspects of their cooperatives.

Keywords: cooperative literacy, sharia cooperatives, cooperative education, financial performance

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan tertentu.¹ Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota koperasi, serta membantu mewujudkan kemajuan tatanan ekonomi nasional dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi). Dalam mewujudkan tujuannya tersebut, koperasi mengambil peran di bidang perekonomian melalui pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, terkhusus anggotanya guna meningkatkan produktivitas demi terwujudnya kesejahteraan anggota. Kegiatan tersebut dapat berupa fasilitas pendanaan terhadap anggota yang hendak menjalankan usaha, memberikan pengarahan dalam mengelola usaha,² melatih masyarakat dalam efektivitas penggunaan pendapatan yang dimiliki, serta menumbuhkan kebiasaan berniaga yang sehat.³ Selain itu, penggunaan

¹ Baswir, Revrison. (2013). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal.21.

² Nugroho, Lucky. (2014). *Challenge Sharia Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia*. European Journal of Islamic Finance , No. 1: 1-6. Diakses pada 8 September 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.13135/2421-2172/793>, hal. 2

³ *Op.Cit*, hal. 53.

koperasi dianggap tepat mengingat koperasi sendiri menggunakan asas demokrasi dalam praktiknya yang sejalan dengan asas Negara Republik Indonesia yaitu demokrasi.

Terdapat prinsip-prinsip yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam berkoperasi, baik secara nasional maupun Internasional. Prinsip Koperasi secara nasional tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Sedangkan secara internasional terdapat Prinsip *Rochdale* dan Prinsip menurut *International Cooperative Alliance* (ICA). Terdapat banyak kesamaan antara prinsip koperasi yang berlaku secara internasional maupun terkhusus untuk Indonesia, salah satunya mengenai pendidikan koperasi. Hal ini menandakan pentingnya penyelenggaraan pendidikan kekoperasian. Pendidikan tersebut dapat melingkupi pendidikan mengenai jati diri koperasi, prinsip koperasi, tujuan koperasi, fungsi koperasi, keuntungan dari berkoperasi, cara berkoperasi yang benar, hak dan kewajiban sebagai anggota, produk-produk ada, keorganisasian, serta peran anggota. (Riansani dkk, 2016; Verma, 2014; Khurana, 2011; Istiqomah dan Rahajuni, 2012; Sukamdiyo, 1999; Daniel, 2017). Pendidikan tersebut sangatlah penting bagi anggota guna membantu mereka mengerti hal-hal tersebut, sehingga dapat timbul kesadaran akan berkoperasi⁴. Kesadaran tersebut penting mengingat koperasi merupakan suatu lembaga yang dimiliki, dikembangkan, dan diatur oleh anggotanya guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka⁵. Seperti prinsipnya, koperasi dijalankan dari, oleh, dan untuk anggota⁶.

Pentingnya penyelenggaraan pendidikan koperasi melahirkan aturan mengenai pengharusan setiap koperasi untuk menyisihkan sekian persen dari SHU nya untuk kegiatan pendidikan. Besaran dana pendidikan tersebut ditentukan oleh para anggota pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan). Pada umumnya, setiap koperasi akan menetapkan dana pendidikan sekitar 2% dari total SHU yang ada (Wawancara dengan Bapak Sultoni Nurifai Kabid Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah

⁴ Prakash, Daman. 2008. "*Management Capacity Building for Strengthening Cooperative Enterprises*". www.ica-ap.coop/files/articles_28, diakses pada 10 November 2018.

⁵ Anania, Paulo, dan Gratian C.R. 2016. "*The Determinants of Success in Agricultural Marketing Co-operatives in Tanzania: The Experience From Mweka Sungu, Mruwia, and Uru North Njari Agricultural Marketing Co-operatives in Moshi District*". *European Journal of Research in Social Sciences*, Vol. 4, No. 3: 62-75. Diakses pada 26 Februari 2019. ISSN: 2056-5429, hal. 63

⁶ Istiqomah dan Rahajuni. 2012. "*Evaluasi Penerapan Prinsip Koperasi Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 (Studi Kasus pada Koperasi-Koperasi Wanita di Kabupaten Banyumas)*". *Jurnal Spread*, Vol. 2, No. 1: 65-72. Diakses pada 8 Oktober 2018, hal. 70

Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2018). Dengan demikian, koperasi dapat menyelenggarakan pendidikan bagi orang-orang di dalamnya.

Tersedianya anggaran pendidikan tidak menjamin bahwa seluruh koperasi akan melaksanakan pendidikan kekoperasian kepada anggotanya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sultoni Nurifai, Kabid Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2018, terdapat fakta menarik yang menyatakan bahwa, meskipun telah terdapat himbauan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua koperasi melaksanakan pendidikan kekoperasian tersebut.

Belum terlaksananya pendidikan koperasi yang merata di seluruh koperasi menimbulkan pertanyaan mengenai pemahaman para anggota mengenai koperasi yang mereka jalankan. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Sultoni Nurifai, Kabid Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2018, terdapat fakta bahwa belum adanya kurikulum pendidikan koperasi yang berlaku secara nasional, sehingga mengakibatkan setiap pendidikan kekoperasian antar koperasi bisa saja berbeda.

Pertanyaan lainnya adalah mengenai kinerja koperasi. Hal tersebut dapat menjadi pertanyaan mengingat koperasi dijalankan oleh anggota yang belum tentu seluruh anggota memahami koperasinya, dikarenakan pendidikan koperasi yang diberikan antar koperasi memiliki standarisasi yang berbeda, dan bahkan ada koperasi yang tidak menyelenggarakan pendidikan kekoperasian. Oleh karena itu, penilaian kinerja keoperasi akan dinilai melalui laporan keuangan.

Untuk mengetahui hubungan antara dua hal tersebut, penelitian kali ini akan menggunakan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) dan KSPPS berbentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai objek penelitiannya. Koperasi Simpan-Pinjam (KSPPS) berbentuk BMT dipilih dikarenakan beberapa alasan, yaitu: (1) Keterbatasan data yang didapat; (2) Jumlah Koperasi berjenis simpan pinjam syari'ah di Yogyakarta lebih banyak dibandingkan koperasi syariah jenis lain. Bukti nya dapat dilihat dari data yang di dapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, yakni dari 47 dari 54 data Koperasi Syariah yang didapatkan merupakan KSPPS dengan dominasi berbentuk BMT. Alasan lain yang melatar belakangi penelitian ini dikarenakan masih minimnya

penelitian mengenai tingkat literasi kekoperasian anggota mengenai koperasi terhadap kinerja keuangan koperasi syariah. Dengan adanya uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Kekoperasian Anggota Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Syariah (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimanakah pengaruh tingkat literasi kekoperasian anggota terhadap kinerja keuangan koperasi syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menunjukkan kecenderungan aspek pengetahuan yang cenderung dimiliki oleh anggota selama ini.

Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kinyuira Daniel K (2017) dengan judul *Assessing the Impact of Co-operative Education/Training on Co-Operatives Performance*. Dalam penelitiannya tersebut, Daniel meneliti mengenai hubungan pendidikan koperasi terhadap kinerja koperasi dengan menggunakan beberapa aspek keuangan. Novianita dan Syamsu Hadi (2017) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan dan Partisipasi Anggota terhadap Perolehan Sisa Hasil Usah (SHU) Anggota KUD Banyumanik Kota Semarang” yang juga meneliti mengenai pengetahuan perkoperasian dan pengaruhnya terhadap SHU suatu KUD.⁷

Koperasi berasal dari dua kata. *Co* dan *operation*, “yang memiliki arti bekerja sama untuk mencapai tujuan”⁸. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mendefinisikan koperasi syariah sebagai badan usaha yang didirikan oleh sekumpulan orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan nilai-nilai Islam. Bentuk lain dari koperasi syariah yang dapat kita temukan adalah berupa BMT atau *Baitul Maal wa Tamwil*.

Pendidikan koperasi merupakan suatu proses pembelajaran terorganisir dan berkelanjutan untuk mengembangkan diri, merubah perilaku, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan koperasi guna menerapkannya ke dalam kegiatan perekonomian (Sukamdiyo, 1999). Hal ini penting mengingat pendidikan koperasi

⁷ Kinyuira, D.K. 2017. “*Assessing the Impact of Co-Operative Education/Training on Co-Operatives Performance*.” *Journal of Strategy & Performance Management*, Vol. 5 Issue 1: 23-41.

⁸ Chaniago, Arifinal. (1985). “*Kekoperasian Indonesia*”. Bandung: Angkasa Bandung. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal. 1.

merupakan salah satu indikator yang menentukan perkembangan suatu koperasi (Garnevska, dkk, 2011).

Literasi Kekoperasian Terdiri dari dari dua kata, yakni literasi dan kekoperasian. Literasi dapat dikatakan sebagai suatu pengetahuan atau kemampuan akan suatu hal tertentu. Menurut Setiadi (2008) dalam Megawati (2015), pengetahuan merupakan sekumpulan informasi yang tersimpan di dalam memori sebagai output dari pembelajaran yang telah dilakukan.⁹ Informasi-informasi tersebut yang kemudian akan menjadi dasar kita dalam melakukan suatu tindakan. Dengan pemaparan tersebut, literasi kekoperasian dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi dan pemahaman guna mengenal dan memahami koperasi yang kita jadikan sebagai mitra secara kelembagaannya.

Berdasarkan artikel dan penelitian terdahulu (Riansani dkk, 2016; Verma, 2014; Khurana, 2011; Istiqomah dan Rahajuni, 2012; Sukamdiyo, 1999:104) kita dapat menarik 6 indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur literasi kekoperasian, yaitu : 1) Pengetahuan anggota mengenai jati diri lembaga; 2) pengetahuan anggota mengenai tugas dan kewajiban lembaga; 3) Pengetahuan anggota mengenai keorganisasian lembaga; 4) pengetahuan anggota mengenai perannya sebagai anggota koperasi; 5) Pengetahuan anggota mengenai mekanisme simpanan; 6) Pengetahuan anggota mengenai mekanisme pembiayaan.

Kinerja koperasi syariah akan dinilai melalui beberapa aspek keuangan, yakni meliputi SHU, ASET, DPK, rasio modal terhadap aset, *cash ratio*, dan rentabilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk melihat tingkat literasi kekoperasian anggota dan hubungannya dengan kinerja keuangan. Meskipun menggunakan penelitian kuantitatif, hasil dari penelitian ini akan dijelaskan tidak hanya berdasarkan pengolahan data angka, akan tetapi juga berupa penjelasan secara deskriptif. . Penjelasan secara deskriptif akan dipaparkan

⁹ Megawati. 2015. *Analisis Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (PERSERO) Cabang Makassar*. Jurnal Manajemen Ide dan Isnpirasi, Vol. 2, No. 2: 103-118. Diakses pada 30 Mei 2018. DOI: <https://doi.org/10.24252/minds.v2i2.4626>, hal. 105.

berdasarkan hasil dari kuisioner yang didapatkan. Metode ini digunakan dengan harapan dapat saling melengkapi sehingga hasil penelitian yang dihasilkan akan semakin kuat.

Teknik penentuan sample data yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sample dengan merumuskan kriteria tertentu sesuai penelitian yang dijalankan.¹⁰ Kriteria dari KSPPS atau BMT yang akan dijadikan menjadi objek penelitian kali ini adalah: (1) Sebuah KSPPS atau BMT yang berbentuk KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah; (2) Berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) Memiliki data keuangan lengkap tahun 2016-2017 di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan berupa sekumpulan pertanyaan dan pernyataan yang telah disusun sesuai dengan penelitian yang dilakukan.¹¹ Kuisioner tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat literasi kekoprasian anggota. Pengukuran kuisioner menggunakan skala likert dengan skala 1-4. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang interviewer melalui pertanyaan yang mendalam dan terstruktur kepada responden yang ditujunya.¹² Wawancara akan dilakukan dengan beberapa anggota Koperasi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijadikan sebagai objek penelitian, beserta Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumentasi dapat berupa buku, catatan, skrip, data, agenda, surat kabar, atau majalah.¹³ Dokumen yang digunakan berupa laporan keuangan Koperasi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat dua macam jenis variabel untuk penelitian ini, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Variabel Independent merupakan variabel yang memberikan pengaruh kepada variabel dependen. Berikut variabel independen yang digunakan sebagai pengukur tingkat literasi kekoprasian anggota (Riansani dkk, 2016; Verma, 2014; Khurana, 2011; Istiqomah dan Rahajuni, 2012; Sukamdiyo, 1999:104) dalam penelitian kali ini, yaitu:

1. Pengetahuan anggota mengenai jati diri koperasi (JDL) (X1)

¹⁰ Arikunto, Suharsimi. (2014). "*Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*". Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal. 33

¹¹ *ibid*, hal. 194

¹² *Ibid.*, hal. 198

¹³ *Ibid.*, hal. 201

2. Pengetahuan anggota mengenai tugas dan kewajiban koperasi (TDK) (X2)
3. Pengetahuan anggota mengenai keorganisasian koperasi (KL) (X3)
4. Pengetahuan anggota mengenai perannya sebagai anggota koperasi (PA) (X4)
5. Pengetahuan anggota mengenai mekanisme simpanan (MS) (X5)
6. Pengetahuan anggota mengenai mekanisme pembiayaan (MP) (X6)

Variabel Dependen merupakan variabel yang terkena pengaruh dari variabel independen. Terdapat dua variabel dependen pada penelitian ini, yaitu:

1. Tingkat Literasi Kekoperasian Anggota (Y1)

Variabel ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat literasi kekoperasian anggota. Hal tersebut akan diukur menggunakan variabel independen yang meliputi, JDL, TDK, KL, PA, MS, dan MP.

2. Kinerja Keuangan Koperasi (Y2)

Kinerja Keuangan koperasi dalam penelitian ini diukur dengan 6 variabel berikut, yaitu:

- a) Aset

Aset adalah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga dikarenakan aktivitas ekonomi di masa lalu dan akan digunakan kembali di masa yang akan datang.¹⁴

- b) SHU (Sisa Hasil Usaha)

SHU merupakan pendapatan bersih koperasi yang akan dibagikan kepada anggota setelah dikurangi dengan kewajiban, dan anggaran lain sesuai dengan kesepakatan saat RAT (UU No. 25 Tahun 1992).

- c) DPK (Dana Pihak Ketiga)

DPK merupakan sebutan bagi dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui layanan keuangan, seperti simpanan giro, tabungan, dan deposito.¹⁵

- d) Rasio Modal Terhadap Aset

Merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan aset.

¹⁴ Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, hal. 69

¹⁵ Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: KENCANA PENAMEDIA Group, hal. 43

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

e) Cash Ratio

Rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar.¹⁶

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

f) Rentabilitas

Rasio yang menggambarkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari aset yang diinvestasikan.

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian didapatkan setelah pengolahan data menggunakan WarpPLS 6.0. Terdapat 14 KSPPS atau BMT yang diikuti sertakan dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan untuk mengukur literasi kekoperasi meliputi variabel JDL, TDK, KL, PA, MS, dan MP. Sedangkan untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan variabel yang meliputi SHU, Aset, DPK, modal terhadap aset, cash ratio, dan rentabilitas.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis Uji *Convergent Validity*

Analisis Uji *Convergent Validity* merupakan tahapan di mana suatu indikator dinyatakan memenuhi kriteria *Convergent Validity* jika memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu (1) loading factor > 0.70; (2) P value < 0.05; (3) AVE > 0.5.

Dari pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua indikator-indikator telah memenuhi convergent validity. Meskipun terdapat beberapa indikator yang mempunyai loading factor < 0.7, akan tetapi hal tersebut masih dapat dipertahankan mengingat terdapat pertimbangan yang memperbolehkan nilai loading

¹⁶ Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, hal. 87

0.4-0.7 untuk tetap dipertahankan. Kasus tersebut biasanya akan ditemukan dalam suatu penelitian baru yang menggunakan kuisioner.¹⁷

Analisis Uji *Discriminant Validity*

Discriminant Validity merupakan suatu proses yang dilakukan guna memastikan adanya suatu indikator dari suatu konstruk tidak berkorelasi tinggi dengan indikator pengukur konstruk lain.¹⁸ *Discriminant Validity* telah terpenuhi jika akar *Average Variances Extracted* (AVE) yang ditampilkan dalam tanda kurung lebih besar dibandingkan korelasi antar variabel laten, baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁹

Berdasarkan output yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa *discriminant validity* seluruh konstruk terpenuhi. Hal tersebut ditandai dengan nilai akar AVE pada kolom diagonal lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk lainnya, serta nilai akar AVE > 0.7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi *Discriminant Validity*.

Uji Realibilitas Konstruk

Tabel 1.

Latent Variable Coefficients

| | JDL | TDK | KL | PA | MS | MP |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Composite reliab. | 0.792 | 0.834 | 0.925 | 0.884 | 0.832 | 0.925 |
| Cronbach's alpha | 0.604 | 0.749 | 0.907 | 0.846 | 0.729 | 0.91 |
| Avg. var. extrac. | 0.563 | 0.505 | 0.608 | 0.533 | 0.559 | 0.509 |

Pengujian selanjutnya adalah uji realibilitas konstruk yang dinilai dengan melihat *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Uji Reabilitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan sudah dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan

¹⁷ Sholihin, M, dan Dwi R. (2013). "*Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis.*" Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, hal. 67

¹⁸ Abdillah, W. dan Jogiyanto HM. (2015). "*Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*". Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, hal 207

¹⁹ Sholihin, M, dan Dwi R. (2013). "*Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*". Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, hal. 73.

data.²⁰ Realibilitas suatu data terpenuhi jika *composite reliability* dan *Cronbach alpa* > 0.70. Meskipun demikian, nilai 0.60 – 0.70 masih dapat diterima selama jenis penelitian tersebut merupakan penelitian eksploratoris.²¹ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria realibilitas konstruk.

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum menguji inner model adalah menguji outer model dari konstruk formatif, yaitu konstruk LITKEU dan KINKEU. Nilai yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah nilai dari P value dan VIF.

Tabel 2.

Output Indicator Weight setelah penghapusan beberapa indikator

| | LITKEU | KINKEU | P value | VIF |
|-------------------|--------|--------|---------|-------|
| lv_JDL | 0.146 | 0 | 0.002 | 1.151 |
| lv_TDK | 0.232 | 0 | <0.001 | 1.669 |
| lv_KL | 0.252 | 0 | <0.001 | 1.903 |
| lv_PA | 0.225 | 0 | <0.001 | 1.568 |
| lv_MS | 0.248 | 0 | <0.001 | 1.967 |
| lv_MP | 0.265 | 0 | <0.001 | 2.278 |
| SHU | 0 | 0.518 | <0.001 | 1.524 |
| DPK | 0 | 0.521 | <0.001 | 1.53 |
| CASH RATI O | 0 | 0.25 | 0.005 | 1.033 |

Setelah dilakukan penghapusan beberapa indikator dan mempertahankan variabel DPK, di dapat hasil output yang telah memenuhi kriteria validitas konstruk formatif seperti yang tertera dalam tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa konstruk LITKEU dibentuk oleh indikator oleh lv_JDL, lv_TDK, lv_KL, lv_PA, lv_MS, lv_MP. Sedangkan konstruk KINKEU dibentuk oleh indikator SHU, DPK, dan CASH RATIO.

²⁰ Arikunto, Suharsimi. (2014). *“Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal. 221.

²¹ Op.Cit., hal. 16

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi Inner Model meliputi pengujian model fit, model structural, serta uji signifikansi antar konstruk. Pengujian model fit dinilai dengan melihat nilai dari *average path coefficient* (APC), *average R-squared* (ARS), serta *average inflation factor* (AVIF). Suatu model dikatakan memenuhi kriteria goodness of fit jika nilai *P Value* APC dan ARS <0.05 dan AVIF < 5 .

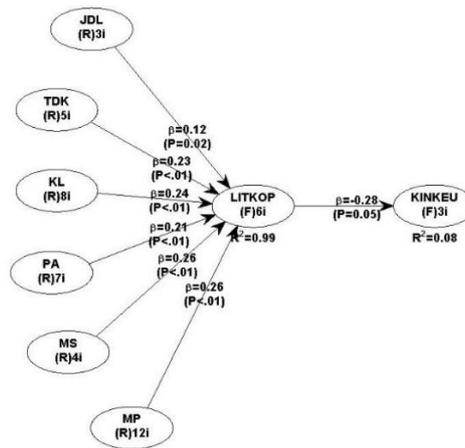
Tabel 3.

Output General Result untuk Penilaian Model Fit

| | Nilai | P Value |
|-------------|--------------|----------------|
| APC | 0.228 | P<0.001 |
| ARS | 0.532 | P<0.001 |
| AVIF | 1.830 | |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa P value APC dan ARS bernilai <0.001 , dan AVIF bernilai 1.830. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model ini sudah memenuhi kriteria *goodness of fit*.

Pengujian Model Struktural dan Pengujian Hipotesis



Gambar 1.

Output Program WarpPLS 6.0

Tabel 4.

Path coefficients

| Path coefficients | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | JDL | TDK | KL | PA | MS | MP | LITKOP | KINKEU |
| LITKOP | 0.124 | 0.228 | 0.236 | 0.212 | 0.262 | 0.257 | | |
| KINKEU | | | | | | | -0.276 | |

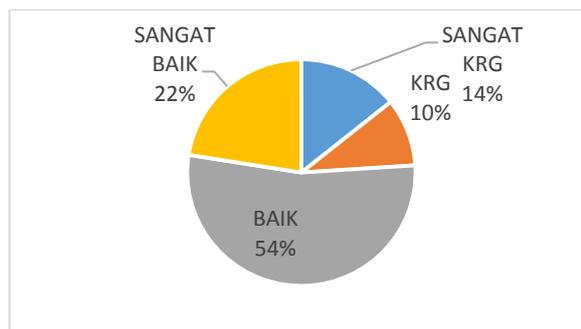
Tabel 5.

P values

| P values | | | | | | | | |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | JDL | TDK | KL | PA | MS | MP | LITKOP | KINKEU |
| LITKOP | 0.016 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | |
| KINKEU | | | | | | | 0.046 | |

Berdasarkan output di atas, dapat diketahui bahwa indikator LDK, TDK, KL, PA, MS, dan MA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi kekeperasian anggota. Sementara itu, tingkat literasi kekeperasian anggota mempunyai pengaruh signifikan dan negatif (tidak langsung) terhadap kinerja keuangan dikarenakan

path coefficients bernilai negatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 sampai 6 diterima, dan hipotesis 7 ditolak. KINKEU (Kinerja Keuangan) memiliki nilai R2 sebesar 0.08 menunjukkan bahwa 8% dari kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh tingkat literasi kekoperasian anggota.

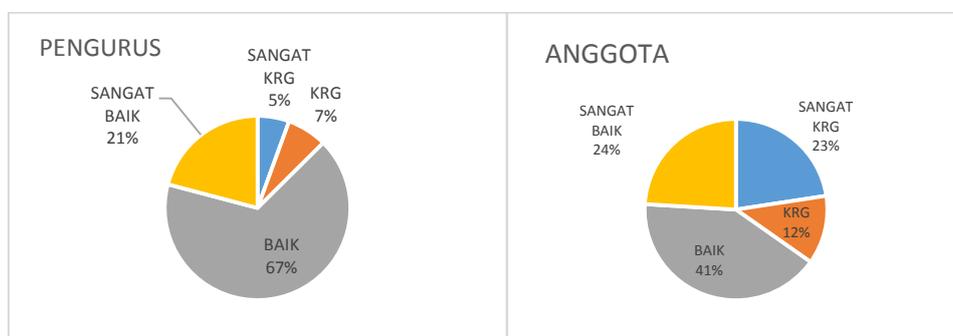


Gambar 2

Diagram Tingkat Literasi Kekoperasian

Secara umum, berdasarkan data yang didapatkan, tingkat literasi kekoperasian anggota secara umum dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dikarenakan 76% anggota sudah mempunyai pemahaman yang baik akan kekoperasian. Akan tetapi, jika kita lihat secara terpisah dari diagram di bawah, akan didapati bahwa baiknya pemahaman kekoperasian lebih di dominasi oleh pengurus dan pengelola.

Berikut aspek yang dapat dijadikan perhatian dikarenakan masih kurangnya pemahaman anggota akan aspek tersebut:



Gambar 3

Tingkat Literasi Kekoperasian Pengurus dan Anggota

Tabel 6

Pemahaman anggota akan tugas dan kewajiban lembaga

| TDK | | | | |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| | SK | K | B | SB |
| S | 11% | 12% | 55% | 22% |
| P | 6% | 9% | 69% | 16% |
| A | 16% | 15% | 41% | 27% |

S: Seluruh; **P:** Pengurus; **A:** Anggota
SK: Sangat Kurang; **K:** Kurang; **B:** Baik; **SB:** Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan anggota koperasi, baik anggota secara keseluruhan, maupun pengurus dan anggota secara terpisah mengenai tugas dan kewajiban koperasi sudah baik. Dengan persentase secara keseluruhan terdapat 77% anggota koperasi sudah paham akan hal tersebut. Sementara secara terpisah terdapat 85% pengurus dan 68% anggota yang telah memahami hal tersebut. Meskipun demikian, hal ini harus tetap menjadi perhatian, mengingat secara keseluruhan masih terdapat 20% (10% sangat tidak tahu dan 10% tidak tahu) anggota dan sebanyak 27% (16% sangat tidak tahu dan 11% tidak tahu) anggota non-pengurus yang masih belum mengetahui salah satu fungsi dari koperasi, yakni menjadi pihak yang dapat membantu mereka dalam mencari bahan dagang .

Tabel 7

Pemahaman anggota akan tugas Koperasi

| BMT Mencarikan Pemasok Barang | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | STT | TT | T | ST |
| K | 10% | 10% | 59% | 21% |
| P | 3% | 9% | 74% | 14% |
| A | 16% | 11% | 44% | 29% |

Tabel 8

Pemahaman anggota akan keorganisasian lembaga

| KL | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | SK | K | B | SB |
| S | 15% | 12% | 59% | 14% |
| P | 5% | 5% | 74% | 16% |
| A | 24% | 19% | 44% | 13% |

| |
|--|
| S: Seluruh; P: Pengurus; A: Anggota SK: Sangat Kurang; K: Kurang; B : Baik; SB : Sangat Baik |
|--|

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan anggota koperasi, baik anggota secara keseluruhan, maupun pengurus terpisah mengenai keorganisasian lembaga koperasi sudah baik. Secara keseluruhan, 73% anggota koperasi sudah memahami keorganisasian dari lembaga koperasi. Secara terpisah, dapat dikatakan pengurus sudah memiliki pemahaman yang baik dengan persentase 80%, dan anggota dengan pemahaman kurang baik persentase anggota yang paham hanya 58%. Pemahaman anggota yang kurang akan keorganisasian lembaga dapat dilihat dari aspek berikut.

Tabel 9
Pemahaman anggota akan pemilihan pengurus

| Pemilihan Pengurus | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | STT | TT | T | ST |
| K | 15% | 27% | 43% | 15% |
| P | 6% | 18% | 59% | 17% |
| A | 24% | 36% | 27% | 13% |

Secara keseluruhan, pengetahuan anggota koperasi mengenai mekanisme pemilihan pengurus dapat dikatakan baik, yakni dengan persentase 58% anggota mengetahui bahwa mereka dapat memilih pengurus koperasi. Sedangkan dari kalangan pengurus terdapat 76% anggota yang mengetahui hal ini dengan baik. Akan tetapi, berbeda di kalangan anggota non-pengurus, pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim, yakni hanya sekitar 40% anggota yang mengetahui hal tersebut dengan baik.

Tabel 10
Pemahaman anggota akan kandidat pengurus

| |
|--------------------------|
| Kandidat Pengurus |
|--------------------------|

| | STT | TT | T | ST |
|----------|------------|-----------|----------|-----------|
| K | 17% | 21% | 54% | 9% |
| P | 6% | 6% | 74% | 14% |
| A | 27% | 34% | 34% | 4% |

Aspek selanjutnya adalah mengenai kandidat pengurus. Berdasarkan teori, dikatakan bahwa seluruh anggota koperasi mempunyai peluang untuk menjadi pengurus koperasi. Akan tetapi, berdasarkan data yang didapatkan, hanya terdapat sekitar 38% anggota non-pengurus yang mengetahui hal tersebut. Sedangkan untuk kalangan pengurus dan secara keseluruhan anggota terdapat 88% dan 63% orang yang mengetahui hal tersebut.

Tabel 11

Pemahaman anggota mengenai kritik dan saran

| Kritik dan Saran | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | STT | TT | T | ST |
| K | 17% | 12% | 61% | 10% |
| P | 5% | 0% | 77% | 18% |
| A | 29% | 23% | 46% | 3% |

Aspek selanjutnya adalah pemberian kritik dan saran. Aspek ini sangat penting guna mengevaluasi jalannya koperasi. Akan tetapi, berdasarkan data yang diperoleh, hanya sekitar 49% anggota non-pengurus yang mengetahui bahwa anggota koperasi dapat memberikan kritik dan saran kepada koperasinya. Hal tersebut perlu dijadikan perhatian karena seharusnya seluruh anggota koperasi merupakan seorang *problem solver*²² mengingat koperasi dijalankan oleh anggotanya.

Tabel 12.

Pemahaman mengenai anggota

| PA | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | SK | K | B | SB |
| S | 10% | 9% | 49% | 33% |
| P | 4% | 5% | 61% | 30% |
| A | 16% | 12% | 37% | 35% |

anggota peran

²² Borzaga, C, dan Giulia, G. (2012). *Promoting the Understanding of Cooperatives for a Better World*. Paper presented at the Euricse Conference, Venice, March 15th-16th, hal. 7

S: Seluruh; **P:** Pengurus; **A:** Anggota
SK: Sangat Kurang; **K:** Kurang; **B:** Baik; **SB:** Sangat Baik

Tabel 13.

Pemahaman anggota mengenai pencarian solusi

| Mencarikan Solusi | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | STT | TT | T | ST |
| K | 14% | 14% | 55% | 17% |
| P | 6% | 0% | 71% | 23% |
| A | 21% | 27% | 40% | 11% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan anggota koperasi, baik anggota secara keseluruhan, maupun pengurus terpisah mengenai peran mereka sebagai anggota koperasi sudah baik. Meskipun demikian, pemahaman anggota mengenai tugas dasar sebagai anggota koperasi harus tetap diperhatikan, mengingat pemahaman mereka terhadap tugas anggota koperasi sebagai pihak yang berkewajiban dalam mencari solusi akan suatu masalah masih kurang baik. Hal tersebut dibuktikan dari kuisioner yang menyatakan bahwa 48% anggota non-pengurus masih belum mengetahui dan memahami pentingnya tugas tersebut.

Tabel 14.

Pemahaman mengenai simpanan

anggota mekanisme

| MS | | | | |
|--|-----------|----------|----------|-----------|
| | SK | K | B | SB |
| S | 19% | 7% | 56% | 18% |
| P | 7% | 6% | 67% | 20% |
| A | 30% | 8% | 45% | 16% |
| S: Seluruh; P: Pengurus; A: Anggota SK: Sangat Kurang; K: Kurang; B: Baik; SB: Sangat Baik | | | | |

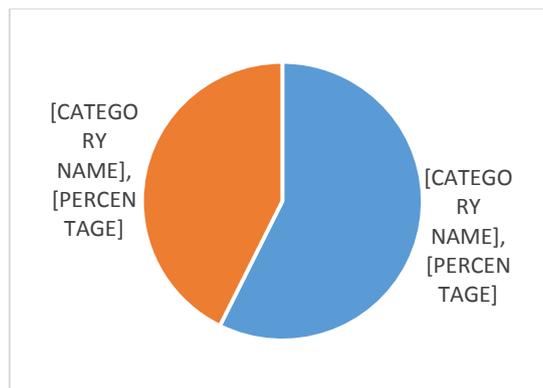
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan anggota koperasi, baik anggota secara keseluruhan, maupun pengurus terpisah mengenai mekanisme simpanan sudah baik. Hal tersebut dilihat dari persentase yang menyatakan

bahwa secara keseluruhan, 74% anggota koperasi sudah memahami mekanisme simpanan dengan baik. Sementara persentase pengurus yang telah memiliki pemahaman yang baik adalah sebesar 87%. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pemahaman anggota non-anggota yang mempunyai pemahaman kurang baik dengan persentase anggota yang paham hanya 61%.

Meskipun berdasarkan output *path coefficient* konstruk MS memiliki nilai paling besar dalam mempengaruhi tingkat literasi kekoprasian anggota, akan tetapi salah satu alasan yang cenderung mempengaruhi kurang baiknya pemahaman anggota non-pengurus adalah dikarenakan masih rendahnya pemahaman mereka mengenai akad-akad yang digunakan. Hal ini dikarenakan meskipun tanpa memahami akad dalam mekanisme simpanan, akan tetapi mereka tetap bisa melakukan simpanan di koperasi.

Terdapat beberapa asumsi yang kemungkinan menjadi penyebab hipotesis tersebut ditolak, yaitu:

1. Belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan koperasi bagi anggotanya



Gambar 4.

Diagram Pendidikan Koperasi

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak anggota yang belum merasakan pelatihan kekoprasian, yang mana hal tersebut merupakan salah

satu pembeda antara bank dan koperasi. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi, Bapak Sulthoni, yang menyatakan bahwa masih banyaknya koperasi yang belum secara rutin memberikan pelatihan kekoperasian dan bahkan ada yang belum melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya.

Salah satu contohnya adalah pada KSPPS KM. Pada koperasi syariah ini, pendidikan koperasi diberikan secara terstruktur hanya diberikan kepada pengelola, sedangkan pendidikan koperasi bagi anggota biasa diberikan secara accidental, yakni saat hendak melakukan pembiayaan. Contoh lainnya adalah KSPPS BMT U yang biasanya mengadakan pelatihan koperasi pada saat RAT (Wawancara oleh bagian Marketing), sehingga bisa dikatakan bahwa yang mendapatkan dampak tersebut hanyalah anggota yang mengikuti RAT.

Meskipun pada diagram di atas menunjukkan bahwa 57% orang menyatakan koperasi telah melakukan pelatihan koperasi bagi anggota, akan tetapi ada kecenderungan kegiatan tersebut belum diberikan secara intensif dan merata. Sehingga mungkin saja hal tersebut menyebabkan anggota memiliki pemahaman yang kurang akan koperasi, sehingga hal tersebut belum terasa pengaruhnya secara langsung.

2. Pemahaman yang masih kurang akan koperasi.

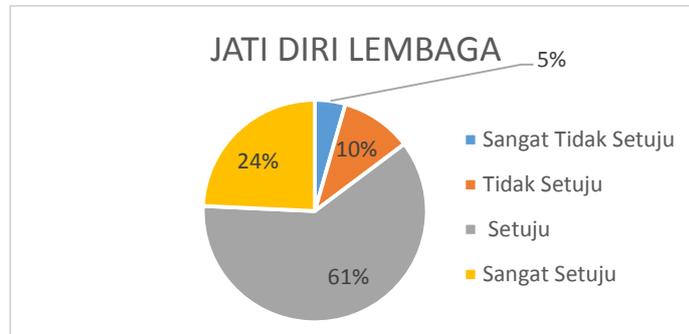
Berdasarkan output, dapat dilihat bahwa konstruk pengetahuan anggota mengenai jati diri lembaga (JDL) memiliki pengaruh paling kecil terhadap literasi kekoperasian dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Tabel 15

Path Coefficients

| <i>Path coefficients</i> | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | JDL | TDK | KL | PA | MS | MP | LITKOP | KINKEU |
| LITKOP | 0.124 | 0.228 | 0.236 | 0.212 | 0.262 | 0.257 | | |
| KINKEU | | | | | | | -0.276 | |

Hal tersebut juga dapat dilihat dari persepsi anggota mengenai koperasi melalui indikator pertanyaan untuk konstruk jati diri lembaga yang didapatkan melalui kuisioner.



Gambar 5.

Diagram Pengetahuan Tentang Jati Diri Lembaga

Salah satu bentuk dari koperasi syariah adalah berupa BMT. Berdasarkan diagram pie di atas, dapat diketahui bahwa 85% (24% sangat setuju dan 61% setuju) dari responden sudah menyadari bahwa lembaga keuangan yang mereka jadikan sebagai mitra merupakan suatu koperasi syariah. Meskipun demikian, masih terdapat 15% (5% sangat tidak setuju dan 10% tidak setuju) anggota yang tidak mengetahui bahwa lembaga keuangan tersebut merupakan bentuk lain dari koperasi syariah.

Hal tersebut dapat terjadi karena ada kecenderungan beberapa dari mereka masih beranggapan bahwa BMT sama saja dengan bank, dikarenakan selama ini kegiatan yang mereka lakukan hanyalah kegiatan transaksi pembiayaan dan simpanan, yang mana hal tersebut dapat pula dilakukan di perbankan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama beberapa responden, berikut pendapat mereka mengenai hal yang membedakan koperasi syariah dengan bank yaitu:

1. Pengajuan pembiayaan yang relatif mudah.

Anggota lebih menyukai untuk melakukan pembiayaan di koperasi syariah dibandingkan bank dikarenakan kemudahan persyaratan serta terdapat jenis pembiayaan yang tidak membutuhkan agunan. Contohnya saja pada KSPPS BMT KM. BMT tersebut hanya akan meminta agunan jika plafon pembiayaan

berada di atas 8 juta rupiah. Contoh lainnya adalah KSPPS G yang menggunakan agunan jika plafon di atas 2 juta rupiah.

2. Dapat melakukan angsuran pembiayaan secara harian, mingguan, maupun bulanan.
3. Toleransi dalam keterlambatan angsuran lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat bahwa perbedaan yang dirasakan oleh anggota hanya sebatas mekanisme pembiayaan, bukan secara kelembagaan. Hal ini sejalan dengan Daniel (2017) yang menyatakan terdapat kecenderungan bahwa koperasi menganggap kegiatan promosi dan marketing sebagai suatu kegiatan pengganti dari pendidikan koperasi. Sehingga merupakan hal yang wajar jika anggota lebih mengetahui koperasi dari aspek kegiatan simpan pinjamnya saja.

Tabel 16
Path Coefficients

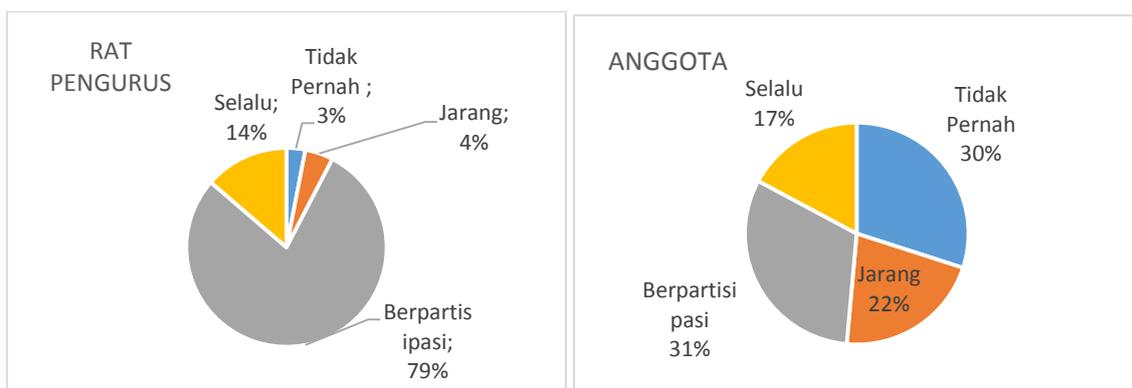
| <i>Path coefficients</i> | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | JDL | TDK | KL | PA | MS | MP | LITKOP | KINKEU |
| LITKOP | 0.124 | 0.228 | 0.236 | 0.212 | 0.262 | 0.257 | | |
| KINKEU | | | | | | | -0.276 | |

Berdasarkan output *path coefficient* dari WarpPLS 6.0, dapat diketahui bahwa urutan variabel yang berpengaruh kuat terhadap tingkat literasi kekoperasian anggota adalah sebagai berikut: (1) MP (Pengetahuan anggota mengenai mekanisme pembiayaan); (2) MS (Pengetahuan anggota mengenai mekanisme simpanan); (3) KL (Pengetahuan anggota mengenai keorganisasian lembaga); (4) TDK (pengetahuan anggota mengenai tugas dan kewajiban lembaga); (5) PA (pengetahuan anggota mengenai perannya sebagai anggota koperasi); (6) JDL (pengetahuan anggota mengenai jati diri lembaga).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan anggota mengenai mekanisme simpanan dan pembiayaan lebih berpengaruh kuat terhadap tingkat literasi kekoperasian dibandingkan faktor lain yang sebenarnya merupakan tujuan utama dari pendidikan koperasi, yakni pemahaman mengenai kelembagaan serta perannya sebagai

anggota. Padahal sejatinya, pemahaman mengenai hal tersebut penting guna terciptanya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perkoperasian.²³

Salah satu contoh bentuk partisipasi anggota dalam kelembagaan dapat dilihat melalui tingkat partisipasi RAT (Rapat Anggota Tahunan).²⁴ Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi (Pasal 22 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian). Rapat ini sangat penting mengingat dalam forum inilah segala penyusunan kebijakan dan penyampaian mengenai kinerja koperasi dilakukan, sehingga sangat diperlukannya partisipasi dari anggota.²⁵



Gambar 6.

Keikutsertaan RAT Pengurus dan Anggota

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa masih terdapat responden anggota koperasi yang tidak pernah (30%) dan jarang (22%) mengikuti RAT. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi aktif anggota non-pengurus dalam RAT selama ini masih kurang. Dapat dikatakan bahwa selama ini ada kecenderungan anggota non-pengurus hanya berperan aktif dalam kegiatan simpanan dan pinjaman dan kurang aktif dalam kelembagaan. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan *output path coefficients* yang menyatakan bahwa pengetahuan mekanisme pembiayaan dan simpanan lebih kuat mempengaruhi tingkat literasi anggota selama ini.

²³ Sukamdiyo, Ign. (1999). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 104.

²⁴ Khan, H.H.A, dkk (2016). "Factors Affecting Performance of Co-operatives in Malaysia". *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 65, Issue 5: 641-671. Diakses pada 26 Februari 2019. <http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-05-2014-0077>, hal. 648.

²⁵ Baswir, Revrisond. (2013). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal. 83.

Oleh karena itu, dapat dikatakan alasan dari literasi koperasi anggota berpengaruh tidak langsung (negatif) terhadap kinerja keuangan adalah dikarenakan pemahaman mereka mengenai lembaga dan perannya sebagai anggota (diwakilkan dengan konstruk JDL, PA, KL, dan TDK) masih kurang. Dengan kata lain, dapat diasumsikan tujuan dari pendidikan koperasi belum terwujud sepenuhnya yang mengakibatkan kurangnya partisipasi anggota secara kelembagaan.

3. Tindakan nyata lebih berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Kecenderungan lain dari penyebab literasi kekoperasian anggota berpengaruh tidak langsung (negatif) terhadap kinerja keuangan koperasi adalah dikarenakan tindakan nyata dari anggota yang didasari pemahamannya akan koperasi lebih mempengaruhi kinerja keuangan.

Dengan kata lain, tindakan anggota merupakan jembatan antara literasi kekoperasian anggota terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Utami, dkk (2014) yang menyatakan bahwa variabel yang paling besar mempengaruhi tingkat partisipasi adalah variabel pengetahuan anggota²⁶, dan penelitian dari Anggoro (2017) yang membuktikan bahwa partisipasi anggota memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Pekalongan.²⁷

Asumsi lain adalah literasi kekoperasian anggota tidak berpengaruh secara langsung kepada kinerja keuangan, akan tetapi mungkin saja akan berpengaruh kepada hal lain, seperti kepada kesejahteraan anggota. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan koperasi, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan anggota.²⁸ Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pemberdayaan melalui kegiatan yang mewujudkan simbiosis mutualisme antar anggota melalui kegiatan koperasi, seperti koperasi yang menjembatani antara anggota yang berperan sebagai konsumen

²⁶ Utami, Riza, dkk. (2015). “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Pontianak.*” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Tanjung Putra*, Vol. 4, No.7, hal. 1.

²⁷ Anggoro, Ikhsan Dwi. (2017). *Pengaruh Partisipasi Anggota, Kepemimpinan Pengurus, dan Prinsip Pemberian Kredit Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Rasa Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.* *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 4: 311 – 318. Diakses pada 8 Oktober 2018, hal. 311

²⁸ Chaniago, Arifinal. (1985). *Kekoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa Bandung. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal. 25

dan anggota lain yang menjadi produsen. Dengan demikian, selain hal tersebut dapat menguntungkan setiap pihak secara material, pemberdayaan anggota pun juga akan terwujud. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh salah satu pendiri KSPPS BMT KM yang menjadikan hal tersebut sebagai salah satu latar belakang dari pendirian KSPPS BMT KM.

Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa literasi kekoprasian anggota berpengaruh tidak langsung (negatif) terhadap kinerja keuangan koperasi dikarenakan tindakan nyata dari anggota yang didasari pemahamannya akan koperasi lebih berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat literasi kekoprasian anggota terhadap kinerja keuangan koperasi syariah.

Tingkat literasi kekoprasian anggota koperasi perlu dipertanyakan mengingat tidak semua koperasi melaksanakan fungsi pendidikan koperasi bagi anggotanya. Pemahaman akan koperasi diperluka bagi anggota mengingat keberhasilan suatu koperasi salah satunya ditentukan oleh anggota.

Penelitian dilakukan di 14 Koperasi Syariah yang tersebar di Yogyakarta. Literasi kekoprasian anggota diukur oleh 6 indikator, yaitu : 1) Pengetahuan anggota mengenai jati diri lembaga (JDL); 2) Pengetahuan anggota mengenai tugas dan kewajiban lembaga (TDK); 3) Pengetahuan anggota mengenai keorganisasian lembaga (KL); 4) Pengetahuan anggota mengenai perannya sebagai anggota koperasi (PA); 5) Pengetahuan anggota mengenai mekanisme simpanan (MS); 6) Pengetahuan anggota mengenai mekanisme pembiayaan (MP). Untuk kinerja keuangan koperasi syariah diukur menggunakan SHU, ASET, DPK, rasio modal terhadap aset, *cash ratio*, dan rentabilitas. Akan tetapi, setelah pengolahan data, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah SHU, DPK, CASH RATIO.

Berdasarkan output dari pengolahan data pada software WarpPLS 6.0, didapatkan hasil menunjukkan bahwa semua variabel pengukur literasi kekoprasian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap tingkat literasi kekoprasian anggota. Dengan demikian hipotesis satu sampai enam diterima. Sementara itu, untuk literasi

kekoperasian anggota berpengaruh negatif (tidak langsung) dan signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi syariah. Dengan demikian, hipotesis ketujuh ditolak. KINKEU (Kinerja Keuangan) memiliki nilai R² sebesar 0.08 menunjukkan bahwa 8% dari kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh tingkat literasi kekoperasian anggota.

Secara umum, tingkat literasi kekoperasian anggota koperasi dapat dikatakan sudah baik. Meskipun demikian, hal tersebut tetap harus dijadikan perhatian mengingat masih terdapat beberapa aspek dari literasi kekoperasian yang masih kurang dipahami oleh anggota, terutama anggota non-pengurus. Hal tersebut terdapat pada pemahaman keorganisasian koperasi yang meliputi pemahaman akan pemilihan calon pengurus serta tugas pengawasan berupa pemberian kritik dan saran kepada koperasi.

Terdapat kecenderungan yang menyebabkan literasi kekoperasian berpengaruh negatif (tidak langsung) tetapi signifikan terhadap kinerja keuangan syariah, yaitu:

1. Belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan koperasi bagi anggotanya
2. Pemahaman yang masih kurang akan koperasi.
3. Tindakan nyata lebih berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Berikut saran dari peneliti yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pemahaman anggota mengenai perkoperasian secara lembaga masih kurang. Oleh karena itu, sebaiknya koperasi syariah lebih intensif dan serius dalam melaksanakan pendidikan koperasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya bisa mencoba untuk menggunakan variabel mediasi, seperti kesejahteraan anggota.
3. Peneliti selanjutnya bisa mencoba menggunakan variabel dependen lain yang sekiranya variabel yang terbuang dalam penelitian ini, yaitu aset, modal terhadap aset, dan rentabilitas serta variabel keuangan lain dapat digunakan.
4. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan software lainnya, seperti AMOS agar dapat mengetahui perbedaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan Jogiyanto HM. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Anania, Paulo, dan Gratian C.R. (2016). The Determinants of Success in Agricultural Marketing Co-operatives in Tanzania: The Experience From Mweka Sungu, Mruwia, and Uru North Njari Agricultural Marketing Co-operatives in Moshi District. *European Journal of Research in Social Sciences*, Vol. 4, No. 3: 62-75. Diakses pada 26 Februari 2019. ISSN: 2056-5429.
- Anggoro, Ikhsan Dwi. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggota, Kepemimpinan Pengurus, dan Prinsip Pemberian Kredit Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Rasa Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 6, No. 4: 311 – 318. Diakses pada 8 Oktober 2018.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Baswir, Revrison. (2013). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Borzaga, C, dan Giulia, G. (2012). Promoting the Understanding of Cooperatives for a Better World. Paper presented at the Euricse Conference, Venice, March 15th-16th.
- Chaniago, Arifinal. (1985). *Kekoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa Bandung. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Garnevaska, Elena, dkk (2011). Factor of Successful Development of Farmer Cooperatives in Northwest China. *International Food and Agribusiness Management Review*, Vol. 14, Issue. 4: 69-84. Diakses pada 26 Maret 2019.
- Iman, Ghozali dan Hengky Latan. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Edisi2*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: KENCANA PENAMEDIA Group
- Istiqomah dan Rahajuni. (2012). Evaluasi Penerapan Prinsip Koperasi Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 (Studi Kasus pada Koperasi-Koperasi Wanita di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Spread*, Vol. 2, No. 1: 65-72. Diakses pada 8 Oktober 2018.
- Khan, H.H.A, dkk (2016). Factors Affecting Performance of Co-operatives in Malaysia, *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 65, Issue 5: 641-671. Diakses pada 26 Februari 2019. <http://dx.doi.org/10.1108/IJPPM-05-2014-0077>.
- Khurana, M.L. (2011). Right to Information Act and Cooperatives. www.ica-ap.coop/files/articles_11
- Kinyuira, D.K. (2017). Assessing the Impact of Co-Operative Education/Training on Co-Operatives Performance. *Journal of Strategy & Performance Management*, Vol. 5 Issue 1: 23-41.
- Megawati. (2015). Analisis Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (PERSERO) Cabang Makassar. *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi*, Vol. 2, No. 2: 103-118. Diakses pada 30 Mei 2018. DOI: <https://doi.org/10.24252/minds.v2i2.4626>
- Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

- Novianita, dan Syamsu Hadi. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan dan Partisipasi Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota KUD Banyumanik Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, Vol. 6, No. 2: 591-601. Diakses 27 Februari 2019. e-ISSN 2502-35.
- Nugroho, Lucky. (2014). Challenge Sharia Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia. *European Journal of Islamic Finance* , No. 1: 1-6. Diakses pada 8 September 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.13135/2421-2172/793>
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Prakash, Daman. (2008). Management Capacity Building for Strengthening Cooperative Enterprises. www.ica-ap.coop/files/articles_28
- Riansani, N., Henny. I., dan Hardisem, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperaso Sri Mersing SMK N 1 Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1: 1-9. Diakses pada 7 September 2018. ISSN: 2355-6897.
- Sholihin, M, dan Dwi R. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Sukamdiyo, Ign. (1999). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang No.25 tahun 1992 Tentang Kekoperasian
- Utami, Riza, dkk. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Tanjung Putra*, Vol. 4, No.7.
- Verma, Sanjaya Kumar. (2014). Communication Strategies for Popularising Cooperative Models Among Youth in India: Brand Building Potentialities with Sesific Reference to NCUI's Experience in School Education. www.ica-ap.coop/files/Publication

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMELIA PRATIWI, S.E, M.E
NIK : 19740623201510113056

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : FAUZIAH RAHMAH
NPM : 20150730064
Fakultas : FAKULTAS AGAMA ISLAM
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Judul Naskah Ringkas : ANALISIS PENGARUH TINGKAT LITERASI
KEKOPERASIAN ANGGOTA TERHADAP KINERJA
KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Hasil Tes Turnitin* : 4%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 4 APRIL 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi,

.....


(..... Dr. Maesyroh, M.A)


(..... Dr. Maesyroh, M.A)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.